

**2 LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN (LKPJ)
KECAMATAN CILAMAYA KULON
TAHUN 2025**



**KECAMATAN CILAMAYA KULON
KABUPATEN KARAWANG**
Jalan Raya Sukamulya Kecamatan Cilamaya Kulon
KARAWANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kecamatan Cilamaya Kulon Kabupaten Karawang Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan program serta anggaran yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pencapaian serta tantangan yang dihadapi dalam upaya pembangunan dan pelayanan publik di Kecamatan Cilamaya Kulon. Dalam penyusunannya, kami melibatkan berbagai pihak, termasuk perangkat daerah lintas sektoral, demi mendapatkan data dan informasi yang akurat serta komprehensif.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat luas, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk perbaikan dan pengembangan di masa yang akan datang. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat kami harapkan demi peningkatan kualitas laporan ini.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan dalam setiap langkah kita untuk membangun Kecamatan Cilamaya Kulon yang lebih baik.

Karawang, 28 Januari 2026



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Dasar Hukum	1
1.2 Visi Dan Misi Kabupaten Karawang	2
1.2.1 Visi	2
1.2.2 Misi	2
1.3 Data Umum Kecamatan Cilamaya Kulon.....	2
1.3.1 Data Geografis Wilayah	2
1.3.2 Data Pegawai	4
1.3.3 Realisasi Anggaran.....	6
1.3.4 Data Informasi Pembangunan	7
BAB II PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	22
2.1 Kebijakan Anggaran Perubahan	22
2.2 Ringkasan Anggaran Dan Realiasi	22
2.3 Pengelolaan Pendapatan Daerah	23
2.4 Pengelolaan Belanja Daerah	23
2.2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24
2.2.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	26
2.2.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan.....	27

2.2.4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	28
2.2.5.	Program Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa	29
2.5	Pengelolaan Biaya Daerah	30
2.6	Analisis Ketidaktercapaian Dan Hambatan	30
2.7	Realisasi Belanja Modal.....	30
2.8	Evaluasi Hasil Realisasi	31
BAB III HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH		32
3.1	Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan	32
3.1.1	Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar	32
3.1.2	Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	33
3.1.3	Pelaksanaan Urusan Pilihan	38
3.1.4	Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Capaian Kinerja TA 2025	38
3.2	Capaian Indikator Kinerja.....	40
3.3	Kebijakan Strategis yang Ditetapkan	41
3.4	Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2024	42
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN.....		43
4.1	Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan Pembantuan	43
4.1.1	Identifikasi Tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya	43
4.1.2	Identifikasi Tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat di bawahnya.....	43
4.2	Hambatan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian	43

BAB V PENUTUP.....	44
5.1 Prestasi Kecamatan Cilamaya Kulon.....	44

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Pegawai T.A. 2026.....	5
Tabel 1. 2 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2025	6
Tabel 1. 3 Realisasi Bidang Jalan dan Jembatan	8
Tabel 1. 4 Realisasi Bidang Sumber Daya Air	10
Tabel 1. 5 Realisasi Bidang Bangunan Gedung.....	11
Tabel 1. 6 Realisasi Pembangunan Peningkatan Jalan	12
Tabel 1. 7 Realisasi Pembangunan Rutilahu	13
Tabel 1. 8 Realisasi Pembangunan MCK.....	16
Tabel 1. 9 Realisasi Pembangunan Sarana Air Bersih.....	16
Tabel 1. 10 Realisasi Pembangunan Septic Tank.....	17
Tabel 1. 11 Realisasi Pembangunan Sarana Peribadatan.....	18
Tabel 1. 12 Realisasi Pembangunan Sarana Olahraga	20
Tabel 2. 1 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Per Program TA 2025	22
Tabel 2. 2 Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24
Tabel 2. 3 Realisasi Program Penyelenggaraan Pemerintah & Pelayanan Publik	26
Tabel 2. 4 Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan	27
Tabel 2. 5 Realisasi Program Ketentraman & Ketertiban Umum	28
Tabel 2. 6 Realisasi Program Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa	29
Tabel 2. 7 Detil Realisasi Belanja Modal	31
Tabel 3. 1 Hasil Urusan Wajib Berkaitan.....	32
Tabel 3. 2 Hasil Urusan Wajib Tak Berkaitan	34
Tabel 3. 3 Rencana Tindak Lanjut untuk TA 2026	39
Tabel 3. 4 Rencana Tindak Lanjut untuk TA 2026	40
Tabel 3. 5 Kebijakan Strategis	41
Tabel 3. 6 TL DPRD pada Tahun Anggaran Sebelumnya.....	42
Table 5. 1 Prestasi Kecamatan Cilamaya Kulon	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Kecamatan Cilamaya Kulon	3
---	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (LKPj) Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun 2025, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten Sukabumi Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan

- Pelaporan Kinerja dan tata cara Rivi u atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Dareah Kabupaten Karawng Tahun 2025 Nomor 8);
 11. Peraturan Bupati Karawang Nomor 81 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Kecamatan diLingkungan Pemerintah Daerah.

1.2 Visi Dan Misi Kabupaten Karawang

1.2.1 Visi

Menuju Karawang Maju, Berdaya Saing Tinggi, dan Berkelanjutan

1.2.2 Misi

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Adaptif dan Berkarakter.
2. Mendorong Sarana Prasarana Pelayanan Dasar yang Inklusif dan Infrastruktur Wilayah yang Terintegrasi.
3. Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Potensi Lokal serta Iklim Investasi yang Ramah dan Kondusif
4. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.
5. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Guna Mendukung Pelayanan Publik yang Inovatif.

1.3 Data Umum Kecamatan Cilamaya Kulon

1.3.1 Data Geografis Wilayah

Kecamatan Cilamaya Kulon merupakan salah satu kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Karawang. Secara geografis, Kecamatan Cilamaya Kulon terletak di bagian utara Kabupaten Karawang dengan jarak sekitar 31 km dari Ibu Kota Kabupaten. Kecamatan ini memiliki luas wilayah ± 1.761 hektare dengan ketinggian rata-rata antara 0–0,5 meter di atas permukaan laut.

Adapun batas wilayah Kecamatan Cilamaya Kulon adalah sebagai berikut: sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tempuran, sebelah timur

berbatasan dengan Kecamatan Cilamaya Wetan, sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, dan sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Banyusari. Gambaran mengenai letak dan batas wilayah Kecamatan Cilamaya Kulon dapat dilihat pada peta administrasi wilayah sebagaimana disajikan pada Gambar 1.1.



Gambar 1. 1 Peta Kecamatan Cilamaya Kulon

Secara administratif, Kecamatan Cilamaya Kulon terdiri atas 12 desa yang terbagi ke dalam 49 dusun, 61 Rukun Warga (RW), dan 178 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan data tahun 2025, jumlah penduduk Kecamatan Cilamaya Kulon tercatat sebanyak 71.993 jiwa, yang terdiri dari 38.185 jiwa penduduk laki-laki dan

33.808 jiwa penduduk perempuan.

Dalam rangka mendukung pelayanan dasar kepada masyarakat, Kecamatan Cilamaya Kulon didukung oleh berbagai fasilitas umum. Fasilitas pendidikan yang tersedia meliputi 19 Taman Kanak-kanak/Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD), 41 Sekolah Dasar (SD) atau sederajat, 6 Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat, serta 4 Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat. Sementara itu, fasilitas kesehatan yang tersedia terdiri atas 2 Puskesmas dan 2 Puskesmas Pembantu (Pustu). Untuk menunjang aktivitas perekonomian masyarakat, di wilayah Kecamatan Cilamaya Kulon terdapat 9 unit minimarket.

1.3.2 Data Pegawai

Keberhasilan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kualitas kompetensi yang memadai serta jumlah yang proporsional. Sumber daya manusia merupakan unsur strategis dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pencapaian tujuan organisasi.

Kecamatan Cilamaya Kulon, sebagai perangkat daerah yang memiliki peran dalam meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, memerlukan dukungan aparatur yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan. Oleh karena itu, ketersediaan aparatur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi menjadi faktor penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan.

Berdasarkan data Tahun Anggaran 2026, komposisi pegawai di lingkungan Kecamatan Cilamaya Kulon terdiri dari aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu, yang menempati berbagai jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana. Rincian data pegawai Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun Anggaran 2026 sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1 menunjukkan bahwa struktur kepegawaian telah disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, serta kegiatan administratif dan operasional kecamatan.

Tabel 1. 1 Data Pegawai T.A. 2026

No.	Nama Pegawai	Jabatan	Pangkat	Gol. Ruang
1	Dudi Rahmat Hidayat, ST., M.M.	Camat	Pembina	IV/a
2	Ifan Christiano, S.TP., M.H.	Sekretaris Camat	Pembina	IV/a
3	Achmad Rifaldi, S.STP., M.M.	Kasi Pemerintahan	Penata	III/c
4	Endang Setia, S.Ag., M.Ag.	Kasi Trantib	Penata Tk. I	III/d
5	H. Nurdin, S.H.	Kasi Kesejahteraan Sosial	Penata Tk. I	III/d
6	H. Daryo Saputra, S.Sos.	Kasubag UPP	Penata Tk. I	III/d
7	Hamdani, A.Md.	Kasubag Keuangan & Kepegawaian	Penata Muda Tk. I	III/b
8	Cecep Supriyadi, S.M.	Bendahara Pengeluaran	Penata Muda	III/a
9	Heri Setiawan	JFT Pol PP Mahir	Penata Muda	III/a
10	H. Waryani Diana, S.M.	Pengelola Data dan Informasi	Penata Muda	III/a
11	Nasuha, S.M.	Pengelola Data dan Informasi	Penata Muda	III/a
12	Kholis Mukhlis	Pengelola Data dan Informasi	Penata	III/c
13	Agung Hartono, S.Kom.	Penata Kelola Sistem Teknologi Informasi	Penata Muda	III/a
14	Mega Marwati, S.IP	Penata Kelola Pemerintahan	Penata Muda	III/a
15	Agus Darsono, S.E.	Penata Layanan Operasional	PPPK Paruh Waktu	—
16	Tarsim Man Gunawan	Operator Layanan Operasional	PPPK Paruh Waktu	—
17	Suherman	Operator Layanan Operasional	PPPK Paruh Waktu	—
18	Nanang	Operator Layanan Operasional	PPPK Paruh Waktu	—
19	Caska	Operator Layanan	PPPK Paruh	—

No.	Nama Pegawai	Jabatan	Pangkat	Gol. Ruang
		Operasional	Waktu	

1.3.3 Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pada unsur kewilayahan sesuai dengan amanat RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029, Kecamatan Cilamaya Kulon melaksanakan 5 Program, 11 Kegiatan, dan 23 Sub Kegiatan. Secara umum, realisasi kinerja keuangan dan fisik pada tahun anggaran 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2025

No	Program	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,043,820,187.00	3,429,124,058.00	84.8
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	341,935,800.00	315,034,200.00	92.13
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	27,229,900.00	27,229,900.00	100
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	280,856,800.00	252,356,800.00	89.85
5	Pogram Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11,748,600.00	11,731,300.00	99.85
TOTAL		4,705,591,287.00	4,035,476,258.00	85.76

Berdasarkan data tabel di atas, secara umum kinerja keuangan Kecamatan Cilamaya Kulon pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan tingkat efektivitas penyerapan mencapai **85,76%**.

1.3.4 Data Informasi Pembangunan

Berdasarkan data rekapitulasi pembangunan di Kecamatan Cilamaya Kulon, berikut adalah rincian pelaksanaan kegiatan pembangunan yang terbagi ke dalam beberapa sektor dinas terkait:

1.3.4.1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pada unsur kewilayahan sesuai dengan amanat RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2025-2029, Kecamatan Cilamaya Kulon melaksanakan 5 Program, 11 Kegiatan, dan 23 Sub Kegiatan. Secara umum, realisasi kinerja keuangan dan fisik pada tahun anggaran 2025 menunjukkan hasil yang sangat baik dengan rincian sebagai berikut:

Secara garis besar, jenis kegiatan fisik yang dilakukan meliputi:

1. Merupakan kegiatan yang mendominasi, mencakup peningkatan jalan poros desa dan jalan lingkungan.
2. Dilakukan pada titik-titik krusial untuk memperlancar aksesibilitas antar dusun dan desa.
3. Difokuskan untuk penahan tanah guna menjaga stabilitas badan jalan.
4. Termasuk pembangunan jembatan penunjang program P2WKSS, BSMSS, dan TMMD.

Dari sisi anggaran, alokasi dana bervariasi tergantung pada volume dan jenis pekerjaan. Sebagian besar kegiatan peningkatan dan perbaikan jalan memiliki pagu anggaran berkisar di angka Rp 150.000.000 hingga Rp 200.000.000 per titik lokasi.

Namun, terdapat beberapa kegiatan strategis dengan alokasi anggaran yang cukup besar, di antaranya adalah **Peningkatan Jalan Pasirukem - Pasirjaya** dengan anggaran sebesar Rp 5.000.000.000, **Peningkatan Jalan Palumbonsari - Karasak** sebesar Rp 3.000.000.000, dan **Peningkatan Jalan Pasirukem Langensari** sebesar Rp 700.000.000.

Adapun rincian dari 43 kegiatan pembangunan infrastruktur fisik yang meliputi pembangunan jembatan, peningkatan, pelebaran, serta

penurapan jalan di wilayah Kecamatan Cilamaya Kulon dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1. 3 Realisasi Bidang Jalan dan Jembatan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Pembangunan Jembatan Desa Sukamulya Kec.Cilamaya Kulon	Rp 200.000.000
2	Penunjang P2WKSS, BSMSS & TMMD; Pembangunan Jembatan Dusun Krajan 2 Desa Sumurgede Kec. Cilamaya Kulon	Rp 199.475.000
3	Peningkatan Jalan Poros Desa Dusun Krajan RT/RW 011/001 Desa Pasirjaya Kec. Cilamaya Kulon (Mus - 1002901)	Rp 150.000.000
4	Peningkatan Jalan Poros Desa Dusun Sambirata (Jalan Poros Sambirata - Pasirjaya) Desa Sukajaya Kec. Cilamaya Kulon (Mus - 957839)	Rp 150.000.000
5	Peningkatan Jalan Desa Manggungjaya Kec. Cilamaya Kulon (P36 - 576223)	Rp 200.000.000
6	Peningkatan Jalan Dusun Ceah RT 024 RW 008 Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon (P19 - 694868)	Rp 200.000.000
7	Peningkatan Jalan Dusun Krajan RT 011 RW 001 Desa Pasirjaya Kecamatan Cilamaya Kulon (P19 - 694780)	Rp 200.000.000
8	Peningkatan Jalan Tangkolo RT 014 RW 004 Desa Tegalurung Kec. Cilamaya Kulon (P42 - 711190)	Rp 200.000.000
9	Peningkatan Jalan Tegalandak - Sumurgede (PD47 - 000004)	Rp 200.000.000
10	Peningkatan Jalan Lingkar Muktijaya Kec. Cilamaya Kulon	Rp 200.000.000
11	Peningkatan Jalan Poros Desa Dusun Bayur Lor RT 10 RW 04 Desa Bayur Lor Kec. Cilamaya Kulon	Rp 200.000.000
12	Peningkatan Jalan Poros Desa Dusun Bayur Lor RT 11 RW 04 Desa Bayur Lor (Bodeman) Kec. Cilamaya Kulon	Rp 200.000.000
13	Peningkatan Jalan Poros Desa Dusun Kp.Sambirata RT/RW 010/003 Desa Sukajaya Kec. Cilamaya Kulon	Rp 200.000.000
14	Peningkatan Jalan Poros Desa Dusun Paris RT 16 RW 06 Desa Bayur Lor Kec. Cilamaya Kulon	Rp 200.000.000
15	Peningkatan Jalan Poros Desa Dusun Tangkolo RT 01 RW 05 Desa Manggungjaya Kec. Cilamaya Kulon	Rp 200.000.000
16	Peningkatan Jalan Poros Desa Dusun Tangkolo RT 02 RW	Rp 200.000.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
	05 Desa Manggungjaya Kec. Cilamaya Kulon	
17	Peningkatan Jalan Poros Desa Dusun Tengkol RT 14 RW 04 Desa Tegalurung Kec. Cilamaya Kulon	Rp 200.000.000
18	Peningkatan Jalan Poros Desa Dusun Wagirsari RT 07 RW 03 Desa Pasirukem Kec. Cilamaya Kulon	Rp 200.000.000
19	Penunjang P2WKSS, BSMSS & TMMD; Peningkatan Jalan Dusun Tangkolo (Blok Makam) Desa Tegalurung Kec. Cilamaya Kulon	Rp 200.000.000
20	Peningkatan Jalan Dusun Cilempung Desa Pasirjaya Kec Cilamaya Kulon	Rp 200.000.000
21	Peningkatan Jalan Pasirukem Langensari	Rp 700.000.000
22	Peningkatan Jalan Pasirukem - Tanjungbaru	Rp 200.000.000
23	Peningkatan Jalan Cermin - Sambirata	Rp 500.000.000
24	Peningkatan Jalan Pasirukem Muktijaya	Rp 200.000.000
25	Peningkatan Jalan Pasirukem -Pasirjaya	Rp 5.000.000.000
26	Pelebaran Jalan Poros Desa Dusun Krajan Barat RT 001 RW 004 Desa Manggungjaya Kec. Cilamaya Kulon (Mus - 1003452)	Rp 150.000.000
27	Pelebaran Jalan Poros Desa Dusun Krajan S/D Dusun Bayur Lor II Desa Bayur Lor Kec. Cilamaya Kulon (Mus - 958060)	Rp 150.000.000
28	Penurapan Jalan Poros Desa Blok Dulpo Krajan Barat RT.006 RW.002 Desa Pasirukem Kec. Cilamaya Kulon (Mus - 918514)	Rp 150.000.000
29	Pelebaran Jalan Dsn. Karajan RT. 003 Ds. Bayur Lor Kec. Cilamaya Kulon (P45 - 718372)	Rp 200.000.000
30	Penurapan Jalan Dusun Krajan RT 012 S/D RT 013 RW 003 Desa Tegalurung Kec. Cilamaya Kulon (P42 - 711288)	Rp 200.000.000
31	Pelebaran Jalan Poros Desa Dusun Pulo Putri RT/RW 07/03 Desa Sukamulya Kec. Cilamaya Kulon	Rp 200.000.000
32	Penurapan Jalan Poros Desa Dusun Lobang Kulon RT/RW 001/001 Blok Martabak Desa Sukajaya Kec. Cilamaya Kulon	Rp 200.000.000
33	Penurapan Jalan Poros Desa Dusun Lobang Kulon RT/RW.001/001 Kulung Kurdi Blok Randu Desa Sukajaya Kec. Cilamaya Kulon	Rp 200.000.000
34	Pelebaran Jalan Bayurlor - Desa Sukamulya	Rp 200.000.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
35	Pelebaran Jalan Bayurlor - Sukamulya	Rp 200.000.000
36	Pelebaran Jalan Kiara - Tegalurung	Rp 200.000.000
37	Pelebaran Jalan Poros Desa Bayurkidul Kecamatan Cilamaya Kulon	Rp 200.000.000
38	Penurapan Jalan Palumbonsari - Krasak Segmen Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kulon	Rp 200.000.000
39	Peningkatan Jalan Dusun Sambirata RT 011 RW 003 Desa Sukajaya Kecamatan Cilamaya Kulon (P19 - 695153)	Rp 200.000.000
40	Pelebaran Jalan Dusun Kecemek RT 011 RW 004 Desa Bayur Kidul Kecamatan Cilamaya Kulon (P19 - 707167)	Rp 200.000.000
41	Peningkatan Jalan Palumbonsari - Karasak	Rp 3.000.000.000
42	Pelebaran Jalan Jl. Poros Kecemek Rk. Iv Ds. Bayur Kidul Kec. Cilamaya Kulon (P45 - 716331)	Rp 200.000.000
43	Pelebaran Jalan Dusun Krajan Barat RT 001 RW 004 Desa Manggung Jaya Kecamatan Cilamaya Kulon (P19 - 706884)	Rp 200.000.000

Tabel 1. 4 Realisasi Bidang Sumber Daya Air

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Penurapan Saluran RT. 12/03 Desa Tegalurung Kec. Cilamaya Kulon	Rp 200.000.000
2	Penurapan Saluran Dusun Krajan Desa Tegalurung Kec. Cilamaya Kulon	Rp 200.000.000
3	Penurapan Saluran Dusun 2 RT. 03/02 Desa Sumurgede Kec. Cilamaya Kulon	Rp 200.000.000
4	Normalisasi Drainase Blok Apur Desa Bayur Kidul Kec Cilamaya Kulon	Rp 200.000.000
5	Normalisasi Saluran Drainase Belakang Kantor Desa Desa Bayur Lor	Rp 200.000.000
6	Pembangunan Drainase Dusun Paris RT. 016 RW. 006 Desa Bayur Lor Kec. Cilamaya Kulon (PD42 - 000005)	Rp 200.000.000
7	Pembangunan Drainase Dusun Drako RT.11 Desa Sukamulya Kec. Cilamaya Kulon (PD45 - 000001)	Rp 200.000.000
8	Pembangunan Drainase Dusun Prako RT. 01 Desa Sukamulya Kec. Cilamaya Kulon (PD45 - 000002)	Rp 200.000.000
9	Pembangunan Drainase RT. 03 RW.01 Desa Kiara Kec. Cilamaya Kulon	Rp 200.000.000
10	Pembangunan Drainase Dsn Kopo Timur RT 09 RW 04 Desa	Rp 200.000.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
	Muktijaya Kec.Cilamaya Kulon	
11	Pembangunan Drainase Blok Daim Desa Bayur Kidul Kec Cilamaya Kulon (Udith)	Rp 200.000.000
12	Pembangunan Drainase Dusun Krajan RT.003 RW.001 Desa Bayur Lor	Rp 200.000.000
13	Pembangunan Saluran Drainase Dusun Krajan RT.003 RW.001 Desa Bayur Lor Kec. Cilamaya Kulon	Rp 200.000.000

Tabel 1. 5 Realisasi Bidang Bangunan Gedung

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Emplacement Dan Pemagaran Puskesmas Bayur Lor Kec. Cilamaya Kulon	Rp 160.000.000
2	Pembangunan/Rehabilitasi Makam Bupati Manggungjaya	Rp 2.000.000.000
3	Pengecatan Pagar Komplek Pemakam Bupati Karawang Di Manggungjaya Cilamaya	Rp 100.000.000

1.3.4.2 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Selain infrastruktur jalan utama, pembangunan di Kecamatan Cilamaya Kulon juga menyasar perbaikan kualitas lingkungan permukiman melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP). Berdasarkan data rekapitulasi, terdapat 120 kegiatan pembangunan fisik yang difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana lingkungan desa.

Fokus utama kegiatan PRKP pada periode meliputi:

1. Mendominasi kegiatan dengan tujuan memperbaiki aksesibilitas di gang-gang permukiman dan akses antar dusun.
2. Ditujukan untuk penataan saluran air permukiman guna mencegah genangan dan menjaga sanitasi lingkungan.
3. Difokuskan pada area yang rawan longsor atau pergeseran tanah di sekitar permukiman.

Sebaran lokasi kegiatan PRKP mencakup berbagai desa, antara lain

Desa Kiara, Tegalurung, Sukajaya, Muktijaya, Pasirjaya, Bayur Kidul, Manggungjaya, hingga Langensari seperti yang tersaji pada tabel 1.6 berikut:

Tabel 1. 6 Realisasi Pembangunan Peningkatan Jalan

No	Kegiatan	Desa
1	Peningkatan jalan lingkungan dusun 4 RT/RW, 002/004	Sumurgede
2	Peningkatan jalan lingkungan dusun 2 RT/RW, 002/002	Sumurgede
3	Peningkatan jalan lingkungan dusun 2 RT/RW, 003/002	Sumurgede
4	Peningkatan jalan lingkungan dusun Kecemek Babakan RT/RW, 007/002	Bayur Kidul
5	Peningkatan jalan lingkungan dusun Kecemek RT/RW, 010/003	Bayur Kidul
6	Peningkatan jalan lingkungan Dusun 1, RT/RW, 001/001`	Sumurgede
7	Peningkatan jalan lingkungan Dusun Puloputri, RT/RW, 007/003	Sukamulya
8	Peningkatan jalan lingkungan Dusun Krajan Barat, RT/RW, 001/001	Muktijaya
9	Peningkatan jalan lingkungan Dusun Krajan, RT/RW, 001/001	Pasirjaya
10	Peningkatan jalan lingkungan Dusun Tegaljaya, RT/RW, 005/005	Muktijaya
11	Peningkatan jalan lingkungan Dusun Prako, RT/RW, 009/004	Sukamulya
12	Peningkatan jalan lingkungan Dusun Pasirkukun, RT/RW, 006/001	Sukamulya
13	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun 5 RT. 002 RW. 005	Sumurgede
14	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun 2 RT. 003 RW. 002 Gg. Kampung Lele	Sumurgede
18	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun 2 RT. 001 RW. 002 Gg. Aron	Sumurgede
19	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun	Sumurgede

No	Kegiatan	Desa
	1 RT. 001 RW. 001 Gg. Melati	
20	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Prako RT. 010 RW. 004	Sukamulya
21	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Puloputri RT. 007 RW. 003	Sukamulya
22	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Cilempung RT. 017 menuju Dusun Cilempung RT.019	Pasirjaya
23	Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Krajan Timur RT. 004 RW. 002	Muktijaya

Berdasarkan rekapitulasi pembangunan TA 2025 di Kecamatan Cilamaya Kulon, sektor peningkatan jalan lingkungan terealisasi sebanyak 20 titik kegiatan guna memperkuat konektivitas antar-lingkungan. Desa Sumurgede menjadi lokus utama dengan intensitas pembangunan tertinggi sebanyak 8 titik, diikuti Desa Sukamulya (5 titik), Muktijaya (3 titik), serta Pasirjaya dan Bayur Kidul masing-masing 2 titik. Intervensi infrastruktur skala mikro ini secara strategis ditujukan untuk pemeratakan aksesibilitas, mempermudah mobilitas warga, serta menstimulasi pertumbuhan ekonomi di tingkat tapak.

Tabel 1. 7 Realisasi Pembangunan Rutilahu

No	Kegiatan	Desa
1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Type A Dusun 2 (P2WKSS)	Sumurgede
2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (FITRIA ALPIATUSAADAH, SODIKIN, MANSYUR, YUSUP)	Sumurgede
3	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (JAENAL ARIPIN, DEDE SUPRIADI)	Sumurgede
4	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (JAJA)	Sumurgede
5	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (KARNI, WARNO, SARTINAH, ANTON)	Sukajaya
6	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (TARKUM, TULADI, MOH. TAUHID, BUSER)	Pasirjaya

No	Kegiatan	Desa
7	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (WASTA, DASIM PERMANA S, DASAN SANUSI)	Bayurlor
8	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (ASEP UDIN, YENI SUHAENI, DARKI, RAFLI ESAHUDIN)	Langgensari
9	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (ARNATA, RUSJA WIJAYA, SARIM)	Muktijaya
10	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (SACA, YAHYA)	Bayurlor
11	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (WANTARA, KASTAM)	Pasirjaya
12	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (EET ECIH, TINAH)	Pasirjaya
13	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (MANTRA, ROSIDAH)	Pasirukem
14	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (SITI JUMAROH, DULHALIM/ KASIROH, CARNATA)	Bayurkidul
15	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (SARIDEM, IKEM)	Langgensari
16	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RAHMAT, SUHENDI, NASORI ALBUKHORI, KARSA, RASWAD)	Bayurlor
17	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (AMAD, KARWAN)	Sukamulya
18	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (KULSUM)	Sukamulya
19	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (FATIMAH)	Sumurgede
20	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (SUKEMIH, SAKIRAH, ROHAENI)	Bayurkidul
21	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (NURHAKIKI, IMAS)	Langgensari
22	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (M. TONURI, YUSUP BACHTIAR)	Manggunjaya
23	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (ADE YUSUP)	Manggunjaya
24	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (SITI MARIYAM)	Kiara
25	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DAWIN)	Manggunjaya
26	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (UJANG)	Muktijaya
27	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (SATAM, RANTA)	Sukamulya

No	Kegiatan	Desa
28	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (SATIM MIHARJA, SUEB)	Pasirukem
29	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (YUYUS)	Pasirukem
30	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (WITEM, WAWAN)	Sukamulya
31	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (KARDI)	Bayurlor
32	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (BENING)	Langgensari
33	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (NATIM, ADE)	Manggunjaya
34	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (ITEUNG)	Manggunjaya
35	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (NYI DASEM, KASIM)	Tegalurung
36	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (IMAS KUSMIATI, TIMAH, RAWI)	Sumurgede
37	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (TADIR, AVIF KAN HASIMA)	Sukamulya
38	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (IKEM, SITI AMINAH)	Bayurlor
39	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUSDI, UJANG, SOMI)	Tegalurung
40	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (CASAM)	Tegalurung
41	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (ITI, KOMARIAH, UUM)	Langgensari
42	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RAHMAT, NANDANG SUHENDAR)	Manggunjaya
43	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (KOSIM, MUHAMAD NANANG)	Pasirjaya
44	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (SAPDI, DUDIN SAEPUDIN)	Kiara
45	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (MUHAMMAD SOPIAN, SITI)	Manggunjaya
46	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (SAMAH)	PAsirjaya
47	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (YANI, M. QORMARUZZ AMAN)	Pasirukem
48	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (KASUM, CALAM)	Pasirukem

Realisasi program Rutilahu di Kecamatan Cilamaya Kulon TA 2025 yang tersaji ada tabel 1.7 di atas mencakup **48 titik kegiatan** yang tersebar di 12 desa guna meningkatkan kualitas hunian masyarakat kurang mampu. Desa Manggungjaya menjadi penerima manfaat terbanyak dengan 7 titik kegiatan, disusul oleh Desa Sumurgede, Sukamulya, Langgensari, Pasirukem, dan Bayurlor yang masing-masing mendapatkan alokasi signifikan. Program pemberdayaan ini secara strategis difokuskan untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan memastikan terpenuhinya standar rumah sehat bagi warga di seluruh wilayah kecamatan.

Tabel 1. 8 Realisasi Pembangunan MCK

No	Kegiatan	Desa
1	Pembangunan MCK Dsn. 1 RT.001 RW. 001	Sumurgede
2	Pembangunan MCK Mushola Al Hasan Dusun Krajan Timur RT 003 / RW 001	Pasirukem

Realisasi pembangunan sarana MCK pada tabel 1.8 di Kecamatan Cilamaya Kulon TA 2025 dilaksanakan di 2 titik lokasi yang bertempat di Desa Sumurgede dan Desa Pasirukem. Pembangunan ini difokuskan pada penyediaan akses sanitasi layak bagi warga maupun fasilitas peribadatan (mushola), sebagai upaya meningkatkan standar kesehatan lingkungan dan mendukung terciptanya kualitas hidup masyarakat yang lebih higienis di wilayah tersebut.

Tabel 1. 9 Realisasi Pembangunan Sarana Air Bersih

No	Kegiatan	Desa
1	Pembangunan Sarana Air Bersih Dsn. 2 RT. 003 RW. 002 (Rumah Lurah) & Dsn. 2 RT. 003 RW. 002 (Rumah Pak Toto)	Sumurgede
2	Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) Dusun II RT001/RW002	Sumurgede
3	Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) Dusun II RT003 RW 002	Sumurgede
4	Pembangunan SPAM Perdesaan (2 Ltr/Detik)	Bayurlor

No	Kegiatan	Desa
5	Pembangunan Sarana Air Bersih (SAB) - Pokir - ABT Pondok Pesantren Manbaul Quran Rt. 002/003	Sumurgede

Realisasi pembangunan sarana air bersih yang tersaji pada tabel 1.9 di Kecamatan Cilamaya Kulon TA 2025 mencakup 5 titik kegiatan yang didominasi oleh Desa Sumurgede sebanyak 4 titik dan Desa Bayurlor melalui pembangunan SPAM Perdesaan berkapasitas 2 Ltr/Detik. Program ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar air bersih masyarakat serta mendukung fasilitas pendidikan keagamaan (pondok pesantren) guna meningkatkan kualitas kesehatan dan produktivitas warga setempat.

Tabel 1. 10 Realisasi Pembangunan Septic Tank

No	Kegiatan	Desa
1	Pembangunan Tangki Septik Individual	Muktijaya
2	Pembangunan Tangki Septik Individual	Pasirjaya
3	Pembangunan Tangki Septik Individual	Sukamulya
4	Pembangunan Tangki Septik Individual	Bayur Kidul
5	Pembangunan Tangki Septik Individual	Langensari

Realisasi pembangunan tangki septik individual pada tabel 1.10 di Kecamatan Cilamaya Kulon TA 2025 dilaksanakan di 5 titik lokasi yang tersebar di Desa Muktijaya, Pasirjaya, Sukamulya, Bayur Kidul, dan Langensari. Program ini merupakan bentuk intervensi sanitasi skala rumah tangga untuk mencegah pencemaran lingkungan serta mendukung percepatan target penghapusan buang air besar sembarangan (BABS) demi meningkatkan taraf kesehatan masyarakat perdesaan.

Tabel 1. 11 Realisasi Pembangunan Sarana Peribadatan

No	Kegiatan	Desa
1	Sarana Peribadatan skala lingkungan	Pembangunan Mushala Nurul Iman (Lanjutan) Dsn. Bayurlor 1 Rt.15/05 Bayurlor
2	Sarana Peribadatan skala lingkungan	Rehab Majelis Ta'lim Nurul Hidayah Bayurlor
3	Sarana Peribadatan skala lingkungan	Rehab Mushala Al-Ikhlas Dsn.Kecemek Rt.006/002 Bayurkidul
4	Sarana Peribadatan skala lingkungan	Rehab Masjid Al-Ikhlas Kp. Paris Rt.017/006 Bayur Lor
5	Sarana Peribadatan skala lingkungan	Pembangunan Majelis Ta'lim Nurul Islam Kp. Pangasinan Rt.001/001 Langensari
6	Sarana Peribadatan skala lingkungan	Rehab Masjid Jamie Al-Ittihad Dsn. Jarong Wetan Rt.005/002 Kiara
7	Sarana Peribadatan skala lingkungan	Pembangunan Mushala Al-Anhar Jl. Cigobang Dsn. Kiserut Rt.001/001 Tegalurung
8	Sarana Peribadatan skala lingkungan	Rehab Majelis Ta'lim Al-Mudriki Dsn. Cilempung Rt.013/004 Pasirjaya
9	Sarana Peribadatan skala lingkungan	Rehab Majelis Ta'lim Kebon Berkah Blok Lapang Dsn. Cilempung Rt.021/004 Pasirjaya
10	Sarana Peribadatan skala lingkungan	Pembangunan Lanjutan Majelis Ta'lim Assalafiyah Dsn. Krajan Barat Rt.005/002 Pasirukem
11	Sarana Peribadatan skala lingkungan	Pembangunan Majelis Ta'lim Dzikir Syarif Hidayatullah Kp. Kopo Barat Rt.006/003 Muktijaya
12	Sarana Peribadatan skala lingkungan	Pembangunan Mushala Al-Ikhlas Dusun Pasir Kukun RT/RW.012/004 Langensari
13	Sarana Peribadatan skala lingkungan	Pembangunan Majelis Talim Miftahul Jannah Dusun Langenjati RT/RW.008/003 Langensari
14	Sarana Peribadatan skala lingkungan	Pembangunan Awning Masjid Bani Husein Dusun Pangasinan RT/RW.004/001 Langensari

No	Kegiatan	Desa
15	Sarana Peribadatan skala lingkungan	Pembangunan Majelis Ta'lim Al-Mutoharoh Jalan Singaperbangsa Sumurgede
16	Sarana Peribadatan skala lingkungan	Rehab Mushola Nurul Islam Dusun Krajan Barat Rt.01/01 Muktijaya
17	Sarana Peribadatan skala lingkungan	Pembangunan Kanopi Masjid Miftahussa'adah Dsn. Krajan Rt. 11/03 Tegalurung
18	Sarana Peribadatan skala lingkungan	Pembnagunan Mushola Muhajirin Dusun Krajan Rt 02 Rw 01 Muktijaya
19	Sarana Peribadatan skala lingkungan	Rehab Mushola Baeturrohman Dusun Prako Rt.09/04 Sukamulya
20	Sarana Peribadatan skala lingkungan	Rehab Masjid Baiturrohman Dsn. Kiserut Rt. 03/01 Desa Tegalurung
21	Sarana Peribadatan skala lingkungan	Pembangunan Emplacement Masjid Assalaf Dusun Prako Rt 10 Rw 04 Sukamulya
22	Sarana Peribadatan skala lingkungan	Pemagaran Majelis Ta'Lim Al-Hidayah Salafiyah Dusun Krajan Timur Pasirukem
23	Sarana Peribadatan skala lingkungan	Pembangunan Tempat Wudhu & Emplacement Mushola Nurul Irfan Dsn. V Rt. 01/05 Sumjrgede

Program sarana peribadatan yang tersaji pada tabel 1.11 di atas dalam TA 2025 di Kecamatan Cilamaya Kulon mencakup **23 kegiatan** yang difokuskan pada rehab dan pembangunan masjid, mushola, serta majelis taklim. Desa Langensari dan Tegalurung menjadi wilayah dengan titik kegiatan terbanyak (masing-masing 4 titik), disusul oleh Bayurlor dan Muktijaya dengan 3 titik. Intervensi ini bertujuan memperkuat infrastruktur spiritual dan sosial guna menunjang kenyamanan ibadah masyarakat di tingkat dusun.

Tabel 1. 12 Realisasi Pembangunan Sarana Olahraga

No	Kegiatan	Desa
1	Sarana Olahraga skala lingkungan	Pembangunan Sarana Olahraga Dsn. Lobang Kulon Rt.001/001 Sukajaya
2	Sarana Olahraga skala lingkungan	Pembangunan Lanjutan Sarana Olahraga Desa Dsn. Krajan Rt.001/001 Pasirjaya

Realisasi pembangunan sarana olahraga pada tabel 1.12 di Kecamatan Cilamaya Kulon TA 2025 dilaksanakan di 2 titik lokasi, yaitu Desa Sukajaya dan Desa Pasirjaya. Kegiatan ini difokuskan pada penyediaan dan pengembangan fasilitas olahraga skala lingkungan guna mendukung aktivitas fisik masyarakat serta memfasilitasi pembinaan pemuda di tingkat desa.

1.3.4.3 Pembangunan Infrastruktur Kecamatan Cilamaya Kulon TA 2025

Secara keseluruhan, realisasi pembangunan di Kecamatan Cilamaya Kulon pada Tahun Anggaran 2025 menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui **163 titik kegiatan** strategis. Sinergi pembangunan ini terbagi dalam dua pilar utama: penguatan konektivitas wilayah oleh Dinas PUPR (**43 kegiatan**) dan peningkatan kesejahteraan dasar oleh Dinas PRKP (**120 kegiatan**).

Pembangunan infrastruktur konektivitas (jalan poros dan jembatan) berhasil membuka akses mobilitas ekonomi antar-desa. Sementara itu, intervensi di sektor permukiman sangat masif dengan 120 kegiatan yang menyasar kebutuhan dasar, mulai dari perbaikan hunian layak (Rutilahu), penguatan sarana peribadatan dan olahraga, hingga pemenuhan sanitasi dan air bersih. Dominasi pembangunan di desa-desa seperti **Sumurgede, Manggungjaya, dan Langensari** mencerminkan upaya pemerataan infrastruktur berdasarkan skala prioritas kebutuhan lokal.

Dapat disimpulkan bahwa pola pembangunan TA 2025 di Kecamatan

Cilamaya Kulon telah bertransformasi dari sekadar pembangunan fisik menjadi pembangunan yang berorientasi pada manusia (*people-centered development*). Integrasi antara infrastruktur jalan yang memadai dengan lingkungan hunian yang sehat dan religius diharapkan mampu menjadi katalisator bagi peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta kemandirian ekonomi masyarakat di seluruh wilayah Kecamatan Cilamaya Kulon.

BAB II

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

2.1 Kebijakan Anggaran Perubahan

Penyusunan Anggaran Perubahan pada Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun Anggaran 2025 merupakan langkah strategis untuk melakukan penyesuaian alokasi belanja terhadap dinamika kebutuhan pelayanan publik dan administrasi kewilayahan. Meskipun secara totalitas pagu anggaran setelah perubahan tetap berada pada angka **Rp4.705.591.287,00**, terdapat pergeseran internal pada level sub kegiatan untuk mengoptimalkan penyerapan dan efektivitas penggunaan dana.

Secara struktur, belanja daerah pada Kecamatan Cilamaya Kulon didistribusikan ke dalam:

1. 5 Program Utama
2. 11 Kegiatan
3. 23 Sub Kegiatan

2.2 Ringkasan Anggaran Dan Realiasi

Berdasarkan data pertanggungjawaban, kinerja keuangan Kecamatan Cilamaya Kulon menunjukkan adanya selisih antara perencanaan dan pelaksanaan. Berikut adalah tabel komparasi anggaran awal, anggaran perubahan, dan realisasi rill:

Tabel 2. 1 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja Per Program TA 2025

No	Program	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan	4,043,820,187	4,043,820,187	3,429,124,058	84.8
2	Penyelenggaraan Pemerintahan	341,935,800	341,935,800	315,034,200	92.13
3	Pemberdayaan Masyarakat	27,229,900	27,229,900	27,229,900	100

No	Program	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
4	Koordinasi Trantibum	280,856,800	280,856,800	252,356,800	89.85
5	Pembinaan Pemerintahan Desa	11,748,600	11,748,600	11,731,300	99.85
TOTAL		4.705.591.287	4.705.591.287	4.035.476.258	85,76

2.3 Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kecamatan Cilamaya Kulon sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjalankan fungsi kewilayahan, dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Karawang, fokus utama kinerjanya adalah pada aspek pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Pada Tahun Anggaran 2025, Kecamatan Cilamaya Kulon tidak dibebankan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersifat retributif secara langsung dalam DPA Perubahan. Sumber pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten; dan
2. Dana Alokasi Umum (DAU).

Pengelolaan administrasi penerimaan, jika ada, tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disetorkan langsung ke Kas Daerah Kabupaten Karawang.

2.4 Pengelolaan Belanja Daerah

Pengelolaan belanja daerah merupakan komponen terbesar dalam struktur anggaran Kecamatan Cilamaya Kulon. Pada Perubahan APBD Tahun 2025, total alokasi anggaran belanja ditetapkan sebesar **Rp 4.705.591.287,00** dengan realisasi sebesar **Rp 4.035.476.258,00** atau mencapai **85,76%**. Penjabaran perubahan dan realisasi belanja dikelompokkan berdasarkan Program Utama sebagai berikut:

2.2.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan program dengan alokasi terbesar yang menunjang operasional dan tulang punggung operasional perkantoran, mencakup pembayaran gaji ASN, penyediaan sarana kantor, hingga pemeliharaan aset dasar kantor (Gaji, Listrik, Aset).

Tabel 2. 2 Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	SiLPA (Rp)	%
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.536.000	10.236.000	1.300.000	88,73
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.888.000	4.888.000	0	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.648.000	5.348.000	1.300.000	80,45
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.627.791.287	3.035.117.291	592.673.996	83,66
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.627.791.287	3.035.117.291	592.673.996	83,66
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	96.397.400	94.989.400	1.408.000	98,54
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.340.100	12.340.100	0	100
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	37.151.300	37.105.700	45.600	99,88
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	34.650.000	33.990.000	660.000	98,1
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	6.346.600	6.346.600		

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	SiLPA (Rp)	%
	Bangunan Kantor				
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	5.909.400	5.207.000	702.400	88,11
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	49.927.300	49.927.300	0	100
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.927.300	49.927.300	0	100
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.359.200	83.700.767	12.658.433	86,86
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	3.000.000	0	100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36.600.000	23.941.567	12.658.433	65,41
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	56.759.200	56.759.200	0	100
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.809.000	155.153.300	6.655.700	95,89
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	87.000.000	80.482.300	6.517.700	92,51
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.510.000	9.510.000	0	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	18.210.400.00	18.210.400.00	0	100

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	SiLPA (Rp)	%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	47.088.600	46.950.600.00	138.000	99,71

Berdasarkan tabel realisasi tersebut, pelaksanaan program mayoritas berjalan baik namun masih meninggalkan **SiLPA sebesar Rp 614.696.129**. Penyumbang terbesar sisa anggaran ini adalah kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar **Rp 592.673.996** serta penyerapan yang tidak maksimal pada belanja rutin seperti listrik, air, dan pemeliharaan kendaraan. Untuk itu, direkomendasikan agar penyusunan anggaran tahun berikutnya dilakukan lebih cermat dengan menyesuaikan alokasi belanja pegawai dan biaya operasional berdasarkan data kebutuhan riil di lapangan agar anggaran dapat terserap habis.

2.2.2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

SiLPA terjadi karena adanya kegiatan/jasa yang tidak terserap optimal di lapangan.

Tabel 2. 3 Realisasi Program Penyelenggaraan Pemerintah & Pelayanan Publik

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	SiLPA (Rp)	%
1	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	73.469.000	73.469.000	0	100
	Peningkatan Efektifitas Pelayanan	73.469.000	73.469.000	0	100
2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	268.466.800	241.565.200	26.901.600	89,98
	Pelaksanaan Urusan	268.466.800	241.565.200	26.901.600	89,98

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	SiLPA (Rp)	%
	Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				

Berdasarkan tabel realisasi di atas, secara umum pelaksanaan program telah berjalan baik di mana salah satu kegiatan berhasil mencapai realisasi 100%, namun masih tercatat adanya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar **Rp 26.901.600** yang bersumber dari kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat akibat penyerapan yang belum optimal. Oleh karena itu, untuk meminimalkan SiLPA di masa mendatang, akan dilakukan evaluasi mendalam terhadap akurasi perencanaan anggaran serta peningkatan intensitas monitoring secara berkala guna mengidentifikasi kendala teknis di lapangan lebih dini.

2.2.3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Berikut adalah rincian realisasi anggaran pada Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang mencakup kegiatan koordinasi pemberdayaan serta peningkatan partisipasi masyarakat, sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.4.

Tabel 2. 4 Realisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa & Kelurahan

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	SiLPA (Rp)	%
1	Koordinasi Pemberdayaan Desa	27.229.900	27.229.900	0	100
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	11.033.900	11.033.900	0	100
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	16.196.000	16.196.000	0	100

Berdasarkan data pada tabel di atas, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan berhasil terealisasi sepenuhnya dengan capaian 100% atau menyerap total anggaran sebesar **Rp 27.229.900**. Ketiadaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) pada program ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah disusun secara presisi dan konsisten dengan kebutuhan riil di lapangan, sehingga seluruh target kinerja pada sub-kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan dan pemberdayaan wilayah dapat terlaksana secara tuntas tanpa kendala penyerapan.

2.2.4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

SiLPA cukup besar pada rincian realisasi anggaran pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi kegiatan sinergitas dengan instansi vertikal di wilayah kecamatan, sebagaimana tersaji dalam Tabel 2.5.

Tabel 2. 5 Realisasi Program Ketentraman & Ketertiban Umum

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	SiLPA (Rp)	%
1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	280.856.800	252.356.800	28.500.000	89,85
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	280.856.800	252.356.800	28.500.000	89,85

Berdasarkan data realisasi di atas, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyisakan **SiLPA sebesar Rp 28.500.000** dengan capaian 89,85%. Sisa anggaran ini terbentuk akibat ketidakmampuan menyerap anggaran secara maksimal pada komponen belanja barang (makan minum dan BBM) serta adanya agenda Perjalanan Dinas yang tidak terlaksana sesuai rencana awal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaktepatan perencanaan kegiatan terhadap

situasi di lapangan, sehingga sebagai langkah perbaikan, akan dilakukan penyusunan jadwal kegiatan yang lebih pasti dan perhitungan belanja operasional yang lebih akurat agar seluruh alokasi anggaran dapat dieksekusi sepenuhnya di masa mendatang.

2.2.5. Program Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa

Berikut adalah rincian realisasi anggaran pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.6.

Tabel 2. 6 Realisasi Program Pembinaan & Pengawasan Pemerintahan Desa

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	SiLPA (Rp)	%
1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	11.748.600	11.731.300	17.300	99,85
	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	11.748.600	11.731.300	17.300	99,85

Berdasarkan data di atas, program ini terealisasi sangat optimal sebesar 99,85% dan hanya menyisakan **SiLPA Rp 17.300**. Minimnya sisa anggaran ini menunjukkan bahwa perencanaan dan pelaksanaan kegiatan koordinasi pembangunan kawasan perdesaan telah berjalan presisi dan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan.

2.5 Pengelolaan Biaya Daerah

Pada Tahun Anggaran ini, Kecamatan Cilamaya Kulon tidak menganggarkan Penerimaan Pembiayaan maupun Pengeluaran Pembiayaan (Nihil), karena surplus/defisit anggaran dikelola langsung oleh tingkat Kabupaten (BUD). Selisih antara Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 670.115.029,00. SiLPA ini bukan merupakan kas yang dikelola oleh Kecamatan untuk tahun berikutnya, melainkan sisa pagu anggaran yang tidak terserap (akibat efisiensi dan kegiatan yang tidak terlaksana) yang secara administratif dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Karawang. Komponen terbesar penyumbang SiLPA adalah Belanja Pegawai (Gaji ASN) dan Belanja Jasa (Listrik & Perjalanan Dinas).

2.6 Analisis Ketidaktercapaian Dan Hambatan

Kecamatan Cilamaya Kulon mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp670.115.029,00 atau setara dengan 14,24% dari total pagu. Ketidaktercapaian ini diakui bersumber dari beberapa faktor teknis pada level Sub Kegiatan:

1. Belanja Pegawai terdapat sisa sebesar Rp592.673.996,00 pada Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (7.01.01.2.02.01). Hal ini disebabkan oleh adanya selisih perhitungan formasi pegawai riil terhadap pagu indikatif yang disediakan.
2. Belanja Barang dan Jasa pada beberapa sub kegiatan operasional seperti pemeliharaan rutin dan belanja jasa kantor mengalami penyerapan yang tidak maksimal dikarenakan efisiensi biaya serta ketidaksesuaian jadwal pelaksanaan koordinasi di lapangan.
3. Belanja Perjalanan Dinas pada Program Koordinasi Keterntaman dan Ketertiban Umum, terdapat alokasi perjalanan dinas dalam kota yang tidak terserap sepenuhnya akibat pengoptimalan koordinasi berbasis digital dan kewilayahan.

2.7 Realisasi Belanja Modal

Berbeda dengan belanja operasional, pelaksanaan **Belanja Modal** pada tahun

anggaran ini mencapai **100%**. Pengadaan aset tetap tetap difokuskan pada pemenuhan sarana perkantoran untuk menunjang kenyamanan pelayanan masyarakat.

Tabel 2. 7 Detil Realisasi Belanja Modal

No.	Jenis Belanja Modal	Anggaran Perubahan (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	Belanja Modal Alat Kantor	10,083,200	10,083,200	100%
2	Belanja Modal Mebel	33,722,500	33,722,500	100%
3	Belanja Modal Alat Studio	6,121,600	6,121,600	100%

2.8 Evaluasi Hasil Realisasi

Berdasarkan uraian realisasi program dan kegiatan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, kinerja keuangan Kecamatan Cilamaya Kulon mencatatkan capaian realisasi sebesar 85,76% atau Rp 4.035.476.258,00 dari total pagu anggaran Rp 4.705.591.287,00. Meskipun pelaksanaan Belanja Modal dan Program Pemberdayaan Masyarakat berhasil mencapai target penyerapan 100%, secara agregat masih terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 670.115.029,00 (14,24%).

Terbentuknya angka SiLPA yang cukup signifikan ini mengindikasikan adanya ketidakakuratan dalam perencanaan anggaran, khususnya pada pos Belanja Pegawai (Gaji ASN) yang menyumbang sisa terbesar akibat selisih perhitungan formasi, serta ketidakmampuan menyerap anggaran operasional secara maksimal pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi utama bahwa penganggaran belum sepenuhnya presisi terhadap kebutuhan riil dan jadwal pelaksanaan di lapangan.

Sebagai tindak lanjut perbaikan kinerja di masa mendatang, prioritas utama yang akan dilakukan adalah meningkatkan kualitas perencanaan anggaran (RKA) dengan berbasis pada data kepegawaian dan kebutuhan operasional yang valid (aktual), serta memperkuat pengendalian pelaksanaan kegiatan agar seluruh alokasi anggaran dapat terserap habis dan memberikan manfaat optimal bagi pelayanan publik.

BAB III

HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN YANG MENJADI KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

3.1.1 Pelaksanaan Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pengukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kecamatan Cilamaya Kulon dilakukan dengan menyandingkan target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2025 dengan realisasi fisik yang dicapai di lapangan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang dialokasikan berdampak langsung pada pemenuhan layanan publik dan target kinerja organisasi.

Berikut adalah rincian capaian kinerja keluaran (output) dan hasil (outcome) dari kecamatan sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.1:

Tabel 3. 1 Hasil Urusan Wajib Berkaitan

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi PD	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Permasalahan
1	Pelayanan Publik	Kecamatan Cilamaya Kulon	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM	Indeks	70	80.28	-	-
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase kegiatan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan lintas sektor	Persentase (%)	100%	100%	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi PD	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Permasalahan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase penyelesaian layanan yang merupakan bagian dari urusan dilimpahkan	Persentase	100%	100%	-	-
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase	100%	100%	-	-

Berdasarkan Tabel 3.1 di atas, secara umum pelaksanaan program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Cilamaya Kulon telah mencapai target secara optimal. Indikator utama **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** menunjukkan capaian yang sangat positif dengan realisasi sebesar **80,28**, melampaui target yang ditetapkan sebesar 70. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan telah memenuhi bahkan melebihi ekspektasi masyarakat.

Selain itu, seluruh sub-kegiatan fasilitasi urusan pemerintahan lintas sektor, penyelesaian layanan yang dilimpahkan, serta koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan mencapai realisasi sempurna sebesar **100%**. Absennya hambatan atau permasalahan dalam pelaksanaan program ini mencerminkan tata kelola birokrasi yang efektif dan koordinasi yang solid dalam menjalankan fungsi pelayanan dasar di wilayah Kecamatan Cilamaya Kulon.

3.1.2 Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar di Kecamatan Cilamaya Kulon

diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, serta optimalisasi dukungan administrasi internal perangkat daerah. Pencapaian kinerja urusan ini diukur melalui indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang mencerminkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kecamatan dalam satu tahun anggaran.

Berikut adalah rincian capaian kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dari 5 (lima) program prioritas kecamatan sebagaimana tersaji dalam Tabel 3.2:

Tabel 3. 2 Hasil Urusan Wajib Tak Berkaitan

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi PD	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Permasalahan
1	Pemberdayaan Desa	Kecamatan Cilamaya Kulon	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase	100%	100%	-	-
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang terlibat dalam kegiatan pemberdayaan	Desa	1	1	-	-
2	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Cilamaya Kulon	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase	100%	100%	-	-
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan	Laporan	2	2	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi PD	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Permasalahan
				Ketertiban Umum					
3	Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kecamatan Cilamaya Kulon	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase	100%	100%	-	-
			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan hasil fasilitasi dan pengawasan pemerintahan desa	Laporan	2	2	-	-
4	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kecamatan Cilamaya Kulon	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Indek	50,01	50,01	-	-
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip	Poin	55,33	55,33	-	-
				Tingkat Kematangan MR	Level	Level 2	Level 2	-	-
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	Persentase	100%	100%	-	-
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Indeks Profesionalitas ASN PNS	Poin	79	76,10	-	-
				Nilai Indeks	Poin	79	76,10	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi PD	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Permasalahan
				Profesionalitas ASN PPPK					
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah	Poin	70,1	80,28	-	-
				Nilai Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah	Poin	30	18,31	-	-
				Meningkatnya Implementasi SPBE/Indeks Pemerintahan Digital Perangkat Daerah	Poin	30	90	-	-
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Realisasi Pemanfaat PBJ	Persentase	100%	84,58%	-	-
				Realisasi Belanja PDN	Persentase	100%	0%	-	-
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Unit Kerja Yang Terpenuhi Kebutuhan	Persentase	100%	71,35%	-	-

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi PD	Uraian Program/ Kegiatan	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Permasalahan	Upaya Permasalahan
				Pelayanan Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik, Front Office, Driver, Dan Komunikasi Terpenuhi					
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	Persentase	100%	100%	-	-

Berdasarkan data pada Tabel 3.2 di atas, pelaksanaan urusan wajib non-pelayanan dasar di Kecamatan Cilamaya Kulon menunjukkan capaian yang pada aspek perencanaan (SAKIP mencapai 55,33 poin) dan digitalisasi layanan publik (SPBE mencapai 90). Namun, pada aspek tata kelola internal, terdapat catatan penting pada indikator tingkat kematangan Manajemen Risiko (MR) yang baru menyentuh **Level 2**. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan manajemen risiko dalam organisasi masih bersifat spontan (*ad hoc*) dan belum terintegrasi secara sistematis ke dalam prosedur kerja harian.

Selain kendala pada sistem manajemen risiko, tantangan administratif juga terlihat pada rendahnya angka digitalisasi arsip yang hanya mencapai 14,23 poin. Permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sarana teknologi informasi berupa laptop dan pemindai (*scanner*) yang memadai, serta ketiadaan tenaga fungsional

arsiparis yang kompeten di lingkup kecamatan. Sebagai langkah perbaikan, pihak kecamatan berkomitmen untuk mengusulkan pengadaan perangkat keras pendukung pada tahun anggaran mendatang serta melakukan pemetaan risiko yang lebih terstruktur guna meningkatkan level maturitas organisasi.

Sementara itu, untuk realisasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) serta Belanja Produk Dalam Negeri (PDN) yang tercatat nol persen, hal ini dikarenakan pada tahun berjalan unit kerja tidak melakukan proses pengadaan barang dan jasa yang bersifat kontraktual, sehingga tidak terdapat data yang diinput ke dalam sistem. Meskipun terdapat beberapa kendala administratif internal tersebut, kualitas pelayanan publik secara umum tetap terjaga dengan sangat baik, yang dibuktikan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada angka 80,28.

3.1.3 Pelaksanaan Urusan Pilihan

Urusan Pemerintahan Pilihan merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki. Untuk wilayah Kecamatan Cilamaya Kulon, sektor Pertanian, Kelautan, dan Perikanan merupakan potensi unggulan wilayah. Namun, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, pelaksanaan urusan pilihan tersebut tidak mendapatkan alokasi anggaran belanja langsung di tingkat kecamatan. Seluruh intervensi pembangunan sektor pilihan (seperti pembangunan Jalan Usaha Tani atau Irigasi) telah diakomodir secara terpusat melalui dinas teknis terkait dan tercatat sebagai output kinerja Dinas tersebut, sehingga pada level operasional kecamatan, realisasi untuk Urusan Pilihan dinyatakan tidak ada kegiatan (Nihil).

3.1.4 Permasalahan dan Upaya Pemecahan Masalah Capaian Kinerja TA 2025

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan, Kecamatan Cilamaya Kulon senantiasa melakukan evaluasi berkala terhadap seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pemantauan pada tahun anggaran berjalan, terdapat beberapa target indikator yang realisasinya belum mencapai angka optimal sesuai dengan target Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Penyimpangan antara target dan realisasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari keterbatasan sarana prasarana penunjang, transisi sistem administrasi digital, hingga dinamika kebijakan pengadaan barang dan jasa. Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan performa organisasi di masa mendatang, berikut adalah rincian identifikasi permasalahan beserta upaya pemecahan masalah yang telah dirumuskan:

Tabel 3. 3 Rencana Tindak Lanjut untuk TA 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Permasalahan	Upaya Pemecahan Masalah
1	Nilai Digitalisasi Arsip Perangkat Daerah	18,31 Poin (Target 30)	Kurangnya sarana pendukung digitalisasi (laptop & scanner) serta ketiadaan tenaga fungsional Arsiparis.	Mengusulkan pengadaan sarana TI pada anggaran mendatang dan mendorong pegawai untuk mengikuti pelatihan SDM terkait indikator kinerja yang dituju.
2	Nilai Indeks Profesionalitas ASN (PNS & PPPK)	76,10 Poin (Target 79)	Masih terbatasnya kesempatan diklat/bimtek teknis bagi pegawai untuk peningkatan kompetensi.	Mendorong pegawai untuk mengikuti pelatihan mandiri melalui webinar/e-learning.
3	Realisasi Pemanfaatan PBJ	84,58% (Target 100%)	Pada tahun berjalan, unit kerja tidak melakukan pengadaan barang/jasa yang bersifat kontraktual.	Melakukan pemetaan kebutuhan barang/jasa yang lebih komprehensif pada siklus perencanaan berikutnya.
4	Realisasi Belanja PDN	71,35% (Target 100%)	Belum adanya transaksi pengadaan barang melalui sistem e-katalog karena ketiadaan paket pekerjaan kontraktual.	Mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri melalui e-purchasing untuk kebutuhan ATK dan operasional kantor.
5	Tingkat Kematangan MR (Manajemen Risiko)	Level 2 (Target Level 2)	Penerapan manajemen risiko masih bersifat spontan dan belum terintegrasi dalam SOP organisasi.	Menyusun dokumen profil risiko kecamatan dan melakukan sosialisasi budaya risiko kepada seluruh aparatur.

Terhadap indikator-indikator yang belum mencapai target tersebut, Kecamatan Cilamaya Kulon melakukan identifikasi mendalam. Kendala utama secara umum bersumber pada keterbatasan sarana penunjang dan transisi sistem administrasi digital. Upaya perbaikan difokuskan pada penguatan infrastruktur teknologi serta peningkatan kapasitas SDM agar pada tahun anggaran mendatang, seluruh target kinerja dapat tercapai secara optimal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

3.2 Capaian Indikator Kinerja

Selain evaluasi tahunan, Kecamatan Cilamaya Kulon juga melakukan pemantauan terhadap kemajuan pencapaian target jangka menengah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis (Renstra). Evaluasi ini sangat penting untuk melihat sejauh mana progres organisasi dalam mewujudkan visi dan misi yang telah direncanakan hingga akhir periode Renstra.

Penyandingan antara target tahunan, realisasi, dan target akhir Renstra menunjukkan tingkat efektivitas program dalam mencapai sasaran strategis yang lebih luas. Berikut adalah rincian capaian kinerja strategis Kecamatan Cilamaya Kulon Tahun Anggaran 2025:

Tabel 3. 4 Rencana Tindak Lanjut untuk TA 2026

No	Tujuan	Indikator	Tahun 2025			Target Akhir Renstra	Capaian Tahun 2025 Terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	Capaian		
1.	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik di kecamatan	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Kecamatan	50.01	61,88	123,7%	56	110,50%
		Nilai Sinergitas Kecamatan	50	42,12	84,2%	62	67,93%
		Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan	2,93	3,31	113%	4	82,75%

Berdasarkan tabel di atas, dapat ditarik beberapa poin analisis terkait posisi kinerja Kecamatan Cilamaya Kulon dalam kerangka Renstra:

1. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Kecamatan: Menunjukkan performa yang luar biasa dengan realisasi 3,31, melampaui target tahunan sebesar 2,93 (capaian 113%). Angka ini terus mendekati target akhir Renstra sebesar 4, yang membuktikan bahwa transformasi pelayanan publik di Cilamaya Kulon berjalan sangat progresif dan konsisten.
2. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dan Nilai Sinergitas: Kedua indikator ini menunjukkan tren positif dengan tingkat capaian terhadap target tahunan masing-masing sebesar 110,5% dan 123,7%. Meskipun masih terdapat gap untuk menuju target akhir Renstra (62 untuk Sinergitas), hasil tahun 2025 ini

memberikan fondasi yang kuat untuk terus melakukan akselerasi pada tahun-tahun berikutnya.

Dengan capaian yang rata-rata sudah menyentuh target tahunan, Kecamatan Cilamaya Kulon optimis dapat memenuhi seluruh target akhir Renstra dengan predikat yang memuaskan melalui penguatan tata kelola internal dan sinergitas lintas sektoral yang lebih intensif.

3.3 Kebijakan Strategis yang Ditetapkan

Kebijakan yang diambil meliputi Peraturan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Perangkat Daerah, yang dituangkan dalam format table 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Kebijakan Strategis

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	Penetapan kebijakan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Cilamaya Kulon	Peraturan Bupati Karawang No. 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Mewujudkan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kepastian layanan.
2	Kebijakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari Bupati kepada Camat guna memperkuat peran kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif.	Peraturan Bupati Karawang No. 40 Tahun 2014 tentang Pengaturan pelimpahan urusan pemerintahan	Mendekatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, memperjelas kewenangan camat, serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
3	Kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman	Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang	Meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan ketertiban umum serta memperkuat koordinasi antar

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
	masyarakat, dan perlindungan masyarakat sebagai upaya menciptakan kondisi wilayah yang aman, tertib, dan kondusif.	Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Pelindungan Masyarakat	pemangku kepentingan dalam menjaga ketenteraman dan perlindungan masyarakat.

3.4 Tindaklanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran 2024

Uraian mengenai kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sebagai bentuk tindaklanjut terhadap rekomendasi DPRD yang dituangkan dalam format table 3.6 sebagai berikut:

Tabel 3. 6 TL DPRD pada Tahun Anggaran Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindaklanjut	Tujuan/Masalah yang diselesaikan
1	NIHIL		

BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

4.1 Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan Pembantuan

Kecamatan Cilamaya Kulon tidak menerima tugas pembantuan untuk tahun anggaran 2025.

4.1.1 Identifikasi Tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat atasnya

NIHIL

4.1.2 Identifikasi Tugas pembantuan urusan pemerintahan yang diterima dari pemerintah tingkat di bawahnya

NIHIL

4.2 Hambatan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Upaya Penyelesaian

NIHIL

BAB V PENUTUP

5.1 Prestasi Kecamatan Cilamaya Kulon

Prestasi Kecamatan Cilamaya Kulon sepanjang tahun anggaran 2025 dituangkan dalam tabel 5.1 berikut:

Table 5. 1 Prestasi Kecamatan Cilamaya Kulon

No	Tingkat	Nama Penghargaan	Perihal	Tanggal Penghargaan
1	Kabupaten	HARAPAN 1 TILAWAH REMAJA PUTRA	MTQH Kabupaten	14 Desember 2025
		HARAPAN 3 TILAWAH DEWASA PUTRA		
		JUARA 2 TILAWAH TUNA NETRA PUTRA		
		HARAPAN 1 QIRO'AT SAB'AH MUROTTAL REMAJA PUTRA		
		HARAPAN 3 TAHFIZH 16 JUZ & TILAWAH PUTRI		
		JUARA 2 TAHFIZH 11 JUZ PUTRA		
		HARAPAN 2 TAHFIZH 30 JUZ PUTRI		
		JUARA 3 TAFSIR BAHASA INDONESIA PUTRA		
		HARAPAN 1 KHAT AL-QUR'AN HIASAN MUSHAF PUTRI		
		JUARA 3 HADITS NABI HAFALAN 500 HADITS TANPA SANAD PUTRI		
		HARAPAN 1 SYARH AL-QUR'AN SYARH AL-QUR'AN PUTRI		
2	Kabupaten	JUARA 2	Anugerah Sri Baduga	07 Oktober 2025
3	Wilayah	JUARA HARAPAN 3	Senam Kreasi Perwosi	19 November 2025

*Tingkat Kabupaten, Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional